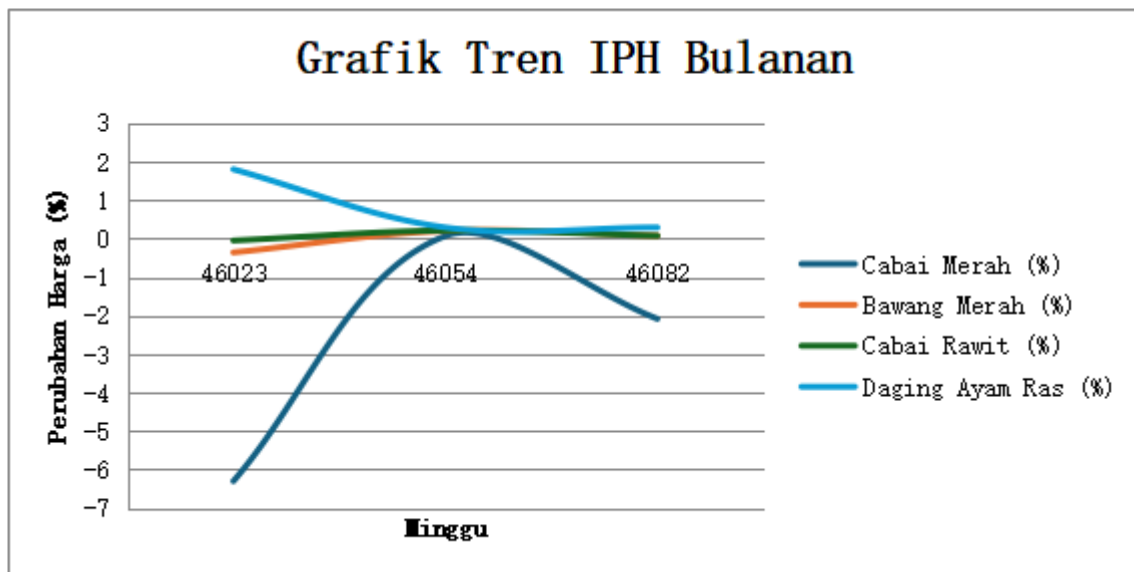


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Gambar : Grafik Indeks Perubahan Harga dari komoditi Pangan



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat data perkembangan harga komoditas strategis selama Triwulan I Tahun 2026, terlihat bahwa pergerakan Indeks Perubahan Harga (IPH) di Kota Solok mengalami fluktuasi yang bervariasi antar komoditas, dengan kecenderungan yang dipengaruhi oleh faktor pasokan dan permintaan.

Pada minggu ke IV bulan Januari 2026, terjadi penurunan harga yang cukup signifikan pada komoditas cabai merah, yang tercermin dari nilai perubahan sebesar **-6,30%**. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan pasokan atau melemahnya permintaan pasca periode akhir tahun. Sementara itu, komoditas daging ayam ras justru mengalami kenaikan sebesar **1,80%**, yang menunjukkan adanya tekanan permintaan atau kenaikan biaya produksi/distribusi.

Memasuki **bulan Februari 2026**, pergerakan harga relatif lebih stabil. Cabai merah menunjukkan kenaikan tipis sekitar **0,07%**, sedangkan cabai rawit mengalami kenaikan sebesar **0,21%**. Kenaikan ini mencerminkan mulai adanya penyesuaian harga akibat perubahan distribusi atau permintaan. Di sisi lain, daging ayam ras mengalami kenaikan yang relatif rendah, yaitu sekitar **0,29%**, yang menunjukkan stabilisasi harga setelah kenaikan pada bulan sebelumnya.

Pada **bulan Maret 2026**, kembali terjadi penurunan harga pada komoditas cabai merah sebesar sekitar **-2,08%**, yang menunjukkan adanya peningkatan pasokan atau intervensi pasar yang efektif. Sementara itu, cabai rawit masih mengalami kenaikan meskipun dalam skala kecil (**0,074%**), dan daging ayam ras tetap stabil dengan kenaikan terbatas sebesar **0,29%**.

Secara umum, selama Triwulan I, komoditas **cabai merah menjadi penyumbang utama fluktuasi IPH** dengan pola penurunan yang cukup signifikan di awal dan akhir periode. Sementara itu, **cabai rawit dan daging ayam ras cenderung stabil dengan tren kenaikan ringan**, yang menunjukkan kondisi pasokan relatif terkendali.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian inflasi pada Triwulan I relatif **terkendali**, dengan tidak adanya lonjakan harga yang signifikan secara konsisten. Namun demikian, komoditas hortikultura seperti cabai tetap menjadi faktor risiko utama yang perlu diantisipasi melalui penguatan pasokan dan distribusi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan Pengendalian Inflasi di Kota Solok

◦ ***Ketergantungan pasokan luar daerah***

Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah merupakan salah satu karakteristik utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kota Solok. Hal ini disebabkan oleh kondisi Kota Solok yang lebih berperan sebagai daerah perdagangan dan jasa, sehingga kapasitas produksi pangan lokal relatif terbatas. Dengan demikian, sebagian besar kebutuhan bahan pangan masyarakat dipenuhi melalui pasokan yang berasal dari daerah lain.

Namun demikian, terdapat pengecualian pada komoditas beras, dimana Kota Solok dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras berkualitas, yaitu “Bareh Solok”. Produksi beras lokal ini menjadi salah satu kekuatan daerah dalam mendukung ketahanan pangan, meskipun untuk komoditas pangan lainnya seperti sayuran, cabai, dan bahan pokok tertentu masih bergantung pada pasokan dari kabupaten/kota sekitar maupun dari luar Provinsi Sumatera Barat.

Kondisi ini menjadikan kelancaran distribusi dan stabilitas pasokan dari luar daerah sebagai faktor penting dalam menjaga ketersediaan dan kestabilan harga di Kota Solok. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus memperkuat koordinasi serta kerja sama antar daerah (KAD) guna menjamin keberlanjutan pasokan dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga secara berkelanjutan.

◦ ***Keterbatasan anggaran kegiatan***

Keterbatasan anggaran kegiatan merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan upaya pengendalian inflasi di daerah. Ketersediaan anggaran yang terbatas berdampak pada ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program strategis, seperti pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, penguatan cadangan pangan, serta kegiatan pemantauan dan intervensi harga. Kondisi ini dapat mempengaruhi intensitas dan cakupan kegiatan yang seharusnya dilakukan secara optimal untuk menjaga stabilitas harga.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berimplikasi pada kemampuan dalam memperluas jangkauan program, baik dari sisi lokasi pelaksanaan maupun jumlah komoditas yang dapat diintervensi. Hal ini menuntut adanya prioritas kegiatan serta optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui penguatan koordinasi lintas OPD dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Bulog, distributor, dan pelaku usaha. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, diharapkan hambatan tersebut dapat diminimalisir sehingga upaya pengendalian inflasi tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Apabila terjadi gangguan pada daerah pemasok, maka akan berdampak langsung pada ketersediaan dan harga di Kota Solok.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian inflasi di Kota Solok :

◦ Memperkuat Kerja Sama Antar Daerah

Penguatan kerja sama antar daerah merupakan langkah strategis dalam menjamin ketersediaan pasokan pangan, khususnya bagi daerah yang memiliki keterbatasan produksi. Melalui kerja sama ini, Pemerintah Kota Solok dapat memastikan kontinuitas pasokan komoditas pangan dari daerah sentra produksi, sehingga potensi gangguan pasokan dapat diminimalisir. Selain itu, kerja sama antar daerah juga mendukung efisiensi distribusi dan stabilitas harga melalui mekanisme pasokan yang lebih terkoordinasi.

Untuk Tri Wulan II akan direncanakan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Tanah Datar, yang akan dilaksanakan pada bulan April 2026.

◦ Meningkatkan Intensitas Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar

Peningkatan intensitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar menjadi salah satu upaya konkret dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara lebih rutin dan menjangkau lebih banyak lokasi, terutama pada periode rawan inflasi seperti Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dengan menyediakan komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau, intervensi ini mampu menekan potensi kenaikan harga serta menjaga daya beli masyarakat.

◦ Digitalisasi Pemantauan Harga

Digitalisasi pemantauan harga merupakan langkah penting dalam meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian data harga pangan. Melalui pemanfaatan aplikasi dan sistem pelaporan berbasis digital, proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data dapat dilakukan secara real time dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam merespons dinamika harga di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.

◦ Penguatan Produksi Lokal Pangan Strategis

Penguatan produksi lokal pangan strategis menjadi upaya jangka panjang dalam mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Pemerintah Kota Solok terus mendorong peningkatan kapasitas produksi melalui dukungan kepada petani, pengembangan teknologi pertanian, serta optimalisasi lahan yang tersedia. Dengan meningkatnya produksi lokal, diharapkan ketersediaan pangan dapat lebih terjamin, stabilitas harga terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi Kebijakan pengendalian inflasi di daerah :

Efektivitas Gerakan Pangan Murah

Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengendalian inflasi daerah yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Pelaksanaan GPM terbukti efektif dalam menstabilkan harga komoditas pangan, khususnya pada saat terjadi peningkatan permintaan atau potensi gejolak harga. Melalui penyediaan bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar, GPM mampu memberikan dampak langsung terhadap penurunan tekanan harga di tingkat konsumen.

Efektivitas GPM juga terlihat dari kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Bulog dan mitra distributor, ketersediaan bahan pangan dapat dipastikan dalam jumlah yang cukup dan distribusi berjalan lancar. Selain itu, pelaksanaan GPM secara rutin dan terjadwal di lokasi strategis memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Di sisi lain, GPM juga berperan sebagai bentuk intervensi pasar yang responsif terhadap dinamika harga. Ketika terjadi indikasi kenaikan harga pada komoditas tertentu, pelaksanaan GPM dapat segera dilakukan sebagai langkah stabilisasi. Hal ini menunjukkan bahwa GPM tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga adaptif terhadap kondisi pasar yang berkembang.

Dengan demikian, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kota Solok dapat dinilai efektif dalam mendukung pengendalian inflasi daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan secara berkelanjutan.

◦ Stabilitas harga komoditas utama

Stabilitas harga komoditas utama merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pengendalian inflasi di daerah. Berdasarkan hasil pemantauan selama periode Triwulan I, harga komoditas pangan strategis di Kota Solok secara umum berada dalam kondisi relatif stabil. Tidak terdapat lonjakan harga yang signifikan, yang menunjukkan bahwa ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi berjalan dengan baik serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi stabilitas harga ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), antara lain melalui pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), penguatan cadangan pangan, serta koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, keseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat terjaga, sehingga harga komoditas utama tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

◦ Koordinasi lintas OPD

Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pengendalian inflasi di daerah. Pemerintah Kota Solok secara konsisten memperkuat sinergi antar OPD terkait, seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan

UKM, Dinas Pertanian dan Pangan, serta perangkat daerah lainnya. Koordinasi ini dilakukan melalui rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi, serta komunikasi intensif guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara terpadu dan saling mendukung.

Melalui koordinasi lintas OPD yang efektif, setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan kewenangannya. Hal ini mencakup kegiatan pemantauan harga, pengendalian pasokan, pelaksanaan intervensi pasar, hingga evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya sinergi yang kuat, respons terhadap dinamika harga dan pasokan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat, sehingga stabilitas harga tetap terjaga.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah

Pengendalian inflasi di daerah merupakan upaya strategis untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagi daerah, khususnya yang termasuk kategori non-IHK, pengendalian inflasi dilakukan melalui pemantauan **Indeks Perubahan Harga (IPH)** serta intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

1. Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Pemerintah daerah perlu memperkuat peran TPID melalui:

- Pelaksanaan **High Level Meeting (HLM)** secara rutin (minimal triwulanan).
- Rapat koordinasi teknis lintas sektor secara berkala.
- Keterlibatan langsung kepala daerah (Wali Kota/Wakil Wali Kota) untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan

2. Pengendalian Ketersediaan Pasokan

Upaya menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis dilakukan melalui:

- Kerja sama antar daerah (KAD) untuk komoditas defisit.
- Penguatan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan (urban farming).

3. Stabilisasi Harga melalui Intervensi Pasar

Kebijakan stabilisasi harga dapat dilakukan dengan:

- Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah.
- Distribusi pangan bersubsidi bagi masyarakat rentan.
- Pengawasan harga dan stok di pasar tradisional dan distributor.

4. Kelancaran Distribusi dan Logistik

Pemerintah daerah perlu memastikan distribusi barang berjalan lancar melalui:

- Perbaikan infrastruktur distribusi (jalan, transportasi).
- Pengendalian biaya distribusi.
- Pengawasan rantai pasok agar tidak terjadi penimbunan.

5. Penguatan Data dan Sistem Informasi

Pengambilan kebijakan harus berbasis data yang akurat melalui:

- Pemantauan harga harian secara digital.
- Penggunaan dashboard inflasi daerah.
- Analisis IPH secara mingguan untuk deteksi dini.

6. Komunikasi Efektif dan Edukasi Publik

Strategi komunikasi dilakukan untuk:

- Menyampaikan informasi harga secara transparan.
- Mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying.
- Mendorong diversifikasi konsumsi pangan.